

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
RETRIBUSI UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KKPD PARIAMAN

Rina Widyanti, Eza Zalwa

e-mail: rinawidyanti99@yahoo.com, zaiwaeza@gmail.com

Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Sumatera Barat

***Abstract:** This study aims to explain the accounting information system levies at the UPTD Conservation and Supervision of Marine and Fisheries Resources of the Pariaman KKPD. The data sources in this study are primary data obtained from direct interviews with related parties. While the analytical method used in this study is a qualitative method which is presented in descriptive form. UPTD Conservation and Supervision of Resources of Marine and Fisheries of KKPD Pariaman are all regions that have reached 100%. this is seen from the annual income target determined by the West Sumatra Province's Maritime Affairs and Fisheries Agency for Rp.74,000,000, while the revenue realization report received by the UPTD is Rp.76,169,000, the amount of income expected by the UPTD has reached the target set. However, unlike the accounting information system, it is still simple, such as the absence of a flow chart from circulation and receipt of retribution, so it needs improvement. While for internal control, it is in accordance with the components of the Environmental Control, Control, Monitoring, Information and Accounting, and Control.*

***Keywords:** Retribution, accounting information system, internal control system*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sistem informasi akuntansi retribusi di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas diketahui bahwa pengumpulan retribusi UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman secara keseluruhan sudah efektif karena masih berada diatas 100%. hal ini dilihat dari target pendapatan pertahun yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.74.000.000, sedangkan laporan realisasi pendapatan yang diterimaoleh UPTD sebesar Rp.76.169.000, berarti pendapatan yang diterima oleh UPTD sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun berbeda halnya dengan sistem informasi akuntansinya masih sederhana seperti belum adanya flowchart dari alur peredaran dan penerimaan retribusi sehingga perlu penyempurnaan. Sedangkan untuk pengendalian intern sudah sesuai dengan komponen baik dari lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, pemahaman resiko, informasi dan akuntansi, dan pemantauan.

Kata Kunci: Retribusi, sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam melakukan pembangunan memerlukan dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensinya demi kemajuan daerah.

Reformasi disektor pemerintahan yang sentralisasi ke desentralisasi, desentralisasi dimaksudkan membentuk kewenangan penuh kepada penentu daerah untuk menggali potensi daerah itu sendiri dengan kata lain, kemandirian daerah sangat diperlukan, pelimpahan wewenang ini disebut dengan istilah Otonomi Daerah.

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dilakukan perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilakukan perubahan ketiga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dan terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, dan dilakukan perubahan undang-undang kedua Nomor 33 Tahun 2004, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang mempunyai potensi penerimaan pajak dan retribusi yang cukup besar. Salah satunya adalah retribusi yang dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pariaman. Terhitung sejak tahun 2009 konservasi untuk penyu ini sudah mencapai 30.000 ekor anak Tukik (anak Penyu) yang telah melakukan penangkaran. UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman ini memiliki beberapa fasilitas yang dapat dikunjungi pengunjung seperti, ruang inkubasi penularan penyu, *hatchery* (tempat penetasan), dan ruang karantina. Pengelola juga menyediakan ruang informasi untuk pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak informasi mengenai tukik-tukik yang ada di pusat konservasi ini.

Rendahnya kontribusi retribusi disebabkan kurangnya pemanfaatan potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menyebabkan perlunya pengevaluasian sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang ada di sistem pendapatan Pemerintah Daerah Pariaman. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal untuk tiket masuk dan pelepasan tukik agar pendapatan lebih meningkat sesuai target tiap tahunnya.

Pengendalian Internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumberdaya suatu organisasi, dan berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*), serta melindungi sumberdaya organisasi baik yang berwujud maupun tidak (Suciati, Handayani dan Hidayat, 2013). Pengendalian internal penting dalam pemungutan retribusi karena dapat di gunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi dengan meneliti apakah sistem telah sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan dan menjamin bahwa setiap penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan diorganisasi dengan baik serta disetorkan seluruhnya ke kas Daerah. Selain itu, sistem pengendalian internal dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai

tujuan pelayanan yang baik untuk masyarakat, dimana pemerintah melakukan pengendalian dalam memantau pelaksanaan sehingga dapat tercapai suatu tujuan.

Sistem informasi sangat penting dalam suatu perusahaan, lembaga atau badan. Dalam sistem informasi akuntansi mencakup beberapa aspek seperti laporan keuangan, dokumen-dokumen yang di gunakan dan sistem organisasi tersebut. Dalam pemungutan retribusi tiket masuk dan Pelepasan Tukik di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman masih kurangnya sistem informasi akuntansinya, sehingga dapat dikatakan Sistem Informasi Akuntansi untuk penerimaan retribusi tiket masuk dan pelepasan Tukik di UPTD Konservasi masih lemah.

Bagaimana sistem informasi akuntansi penerimaan retribusi tiket masuk dan pelepasan Tukik di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan di KKPD Pariaman merupakan hal yang menarik untuk di teliti.Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Retribusi UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman”**.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Tata Sutabri (2012:3) dalam Jarnuji (2016), “Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau himpunan atau variabel, yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu”.

“Sistem informasi Akuntansi adalah sekumpulan sumber dana dan daya (*resources*), seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam” (Ardana dan Hendro 2016:5).

Pada tahun 1992, COSO melakukan *study* untuk merancang suatu standar sistem pengendalian internal. Ada hal penting yang dihasilkn oleh COSO, yaitu pengertian sistem dan komponen pengendalian internal.

Menurut COSO komponen pengendalian internal ada lima yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang abadi dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian internal yang baik.

2. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi.

3. Pemahaman Resiko

Menurut COSO ada tiga kelompok resiko yang dihadapi oleh perusahaan:

- a. Resiko Strategis
- b. Resiko Financial
- c. Resiko Informasi

4. Informasi dan Komunikasi

Menurut COSO perancang Sistem Informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hak-hak dibawah ini:

- a. Bagaimana transaksi diawali
- b. Bagaimana data dicata dalam formulir yang siap diinput ke dalam komputer
- c. Bagaimana file data dibaca, diorganisasi dan diperbarui isinya

- d. Bagaimana data diproses agar menjadi informasi dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan
- e. Bagaimana informasi yang baik dilaporkan
- f. Bagaimana transaksi berakhir

Semua hal tersebut dapat dimunculkan jejak auditnya, oleh karena itu perancang sistem perlu menanamkan suatu fasilitas yang memungkinkan digunakan jejak audit tersebut.

5. Pemantauan

Menurut Coso bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu proses berikut:

- a. Supervise yang efektif, yaitu manajemen yang lebih luas mengawasi manajemen dan karyawan dibawahnya
- b. Akuntansi pertanggungjawaban, yaitu perusahaan menerapkan suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja masing-masing manajer, masing-masing departemen dan masing-masing proses yang dijalankan oleh perusahaan
- c. Audit internal, yaitu pengauditan yang dilakukan oleh auditor didalam perusahaan.

Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, yang menjadi komponen pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Pajak Daerah
“Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, (baik pemerintah daerah TK I maupun pemerintah daerah TK II) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD), jadi pajak daerah merupakan pungutan pajak yang ditetapkan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya” Tony Marsyahrul (2005:5) dalam Puspitasari (2014).
 - b. Retribusi Daerah
Menurut Siahaan (2006:6) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Siahaan (2006:437), jenis retribusi ada dua yaitu:
 1. Retribusi jasa umum
 2. Retribusi jasa usaha
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Perusahaan daerah berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan dan industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jenis pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi

dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu, Pendapatan ini meliputi:

Pajak

Menurut Supramono dan Theresia (2010:2) “Pajak adalah sebagai iuran wajib tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Retribusi Daerah

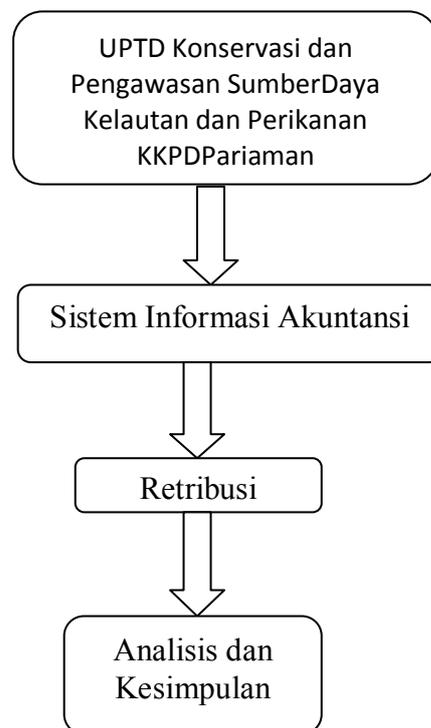
Menurut Halim (2002:19) dalam Murmaningtyas (2007), “Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atas pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku”.

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Veronica Wahyu Kristi Murmaningtyas (2007)	Analisis efesiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.	Efesiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten sleman dari tahun 2004 sampai tahun 2006 tidak berjalan.
2	Daniel Januar (2016)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Retribusi Parkir Di Kota Surabaya.	Sistem penerimaan pendapatan retribusi parkir dimulai dengan cara Dinas Perhubungan akan mengeluarkan atau menerbitkan karcis parkir yang beroperasi oleh Dinas Pendapatan untuk didistribusikan kepada koordinator juru parkir dan juru parkir yang dikoordinasi olehnya untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat pengguna parkir.
3	Rima Maulini (2011)	Sistem Informasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Berbasis <i>Client Serve</i> Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Proses penerimaan hanya dicatat dalam buku penerimaan sehingga bagian administrasi kesulitan dalam merekap laporan setiap hari atau bulannya yang terjadi kesalahan manusia perekapannya.
4	Feisly Kesek (2013)	Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota manado	Secara keseluruhan tingkat efektifitas penerimaan pajak parkir sangat efektif di tahun 2009 dan kurang efektif di tahun 2010. Dan kontribusinya sangat kecil.
5	Merystika Kabuhung (2013)	Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pada Organisasi Nirlaba Keagamaan	Jemaah GMIM masih menggunakan Sistem manual yang memiliki kelemahan pada pemisahan tugas antara pencatatan dan penyimpanan kas, tetapi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perencanaan dan pengendalian keuangan pada jemaah GMIM Nafiri dapat dikatakan telah berjalan efektif, karena telah sesuai unsur-unsur Sistem

			Informasi Akuntansi dan prosedur-prosedur Pengendalian Internal.
6	Lora Mona Mawikere & Jantje J. Tinangon (2016)	Analisis Sistem dan Prosedur Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado	Penerimaan Retribusi Kebersihan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permandagri No. 59 Tahun 2007

Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman terhitung dari bulan November 2018.

Data dan Sumber Data

1. Data
 - a. Data Primer, Penulis secara langsung melakukan observasi, mengadakan wawancara langsung, dan dokumentasi lapangan.
 - b. Data Sekunder, data yang bersumber dari olahan UPTD berupa dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, gambaran umum UPTD, struktur organisasi, dan Sistem Informasi Akuntansi.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan

Metode Pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literature, karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan staf UPTD.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diambil melalui survei. Proses kegiatan analisis deskriptif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Akuntansi

Prosedur disuatu perusahaan profit maupun nonprofit sangat penting, agar suatu perusahaan tersebut berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. Salah satunya aturan atau prosedur yang ada di UPTD Konservasi dan Pengawasan pada Prosedur Penerimaan PAD.

Dengan adanya dasar hukum yang telah diterbitkan maka SOP penilaian ini harus dijalankan dengan baik, jika SOP tidak dijalankan dengan baik maka hasil evaluasi kinerja tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu UPTD yang mengikuti langkah langkah sebagai berikut (manual dan elektronik mencakup data):

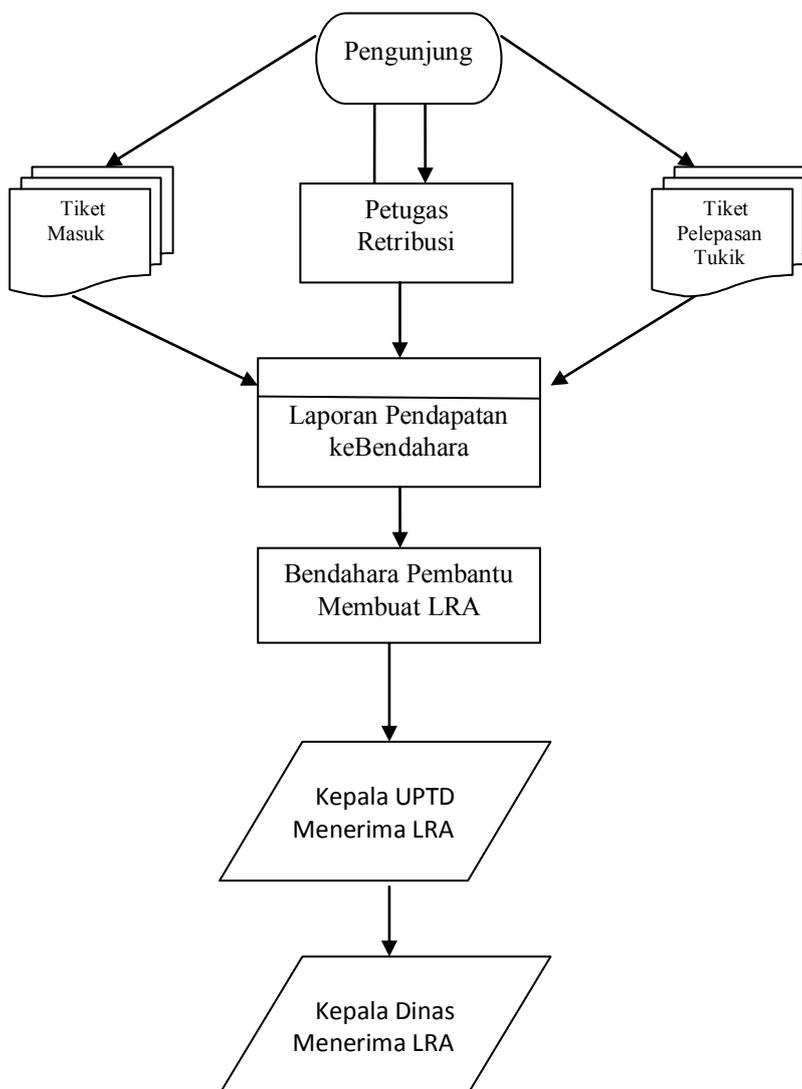
1. Nama dan alamat wajib retribusi
2. Pekerjaan wajib retribusi
3. Nama instansi
4. Nama UPT
5. Jenis komoditi
6. Ukuran atau cara
7. Banyak (ekor atau kg)
8. Harga persatuan (Rp)
9. Jumlah harga (Rp)
10. Tempat dan tanggal retribusi dilakukan
11. Nama dan tanda tangan bendahara pembantu penerima
12. Nama dan tanda tangan kepala UPT atau UPTD
13. Realisasi target PAD setiap bulan

Penjelasan diatas, bahwa UPTD Konservasi dan Pengawasan merupakan nauangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Barat, serta diatur dalam dasar hukum Peraturan Gubernur Sumatera Barat dan harus diikuti prosedur yang ada supaya mendapatkan hasil yang baik, (lihat pada lampiran 3).

Komponen Pengendalian

1. Lingkungan Pengendalian, Merupakan sarana dan prasarana yang ada di UPTD untuk menjalankan pengendalian internal yang baik.

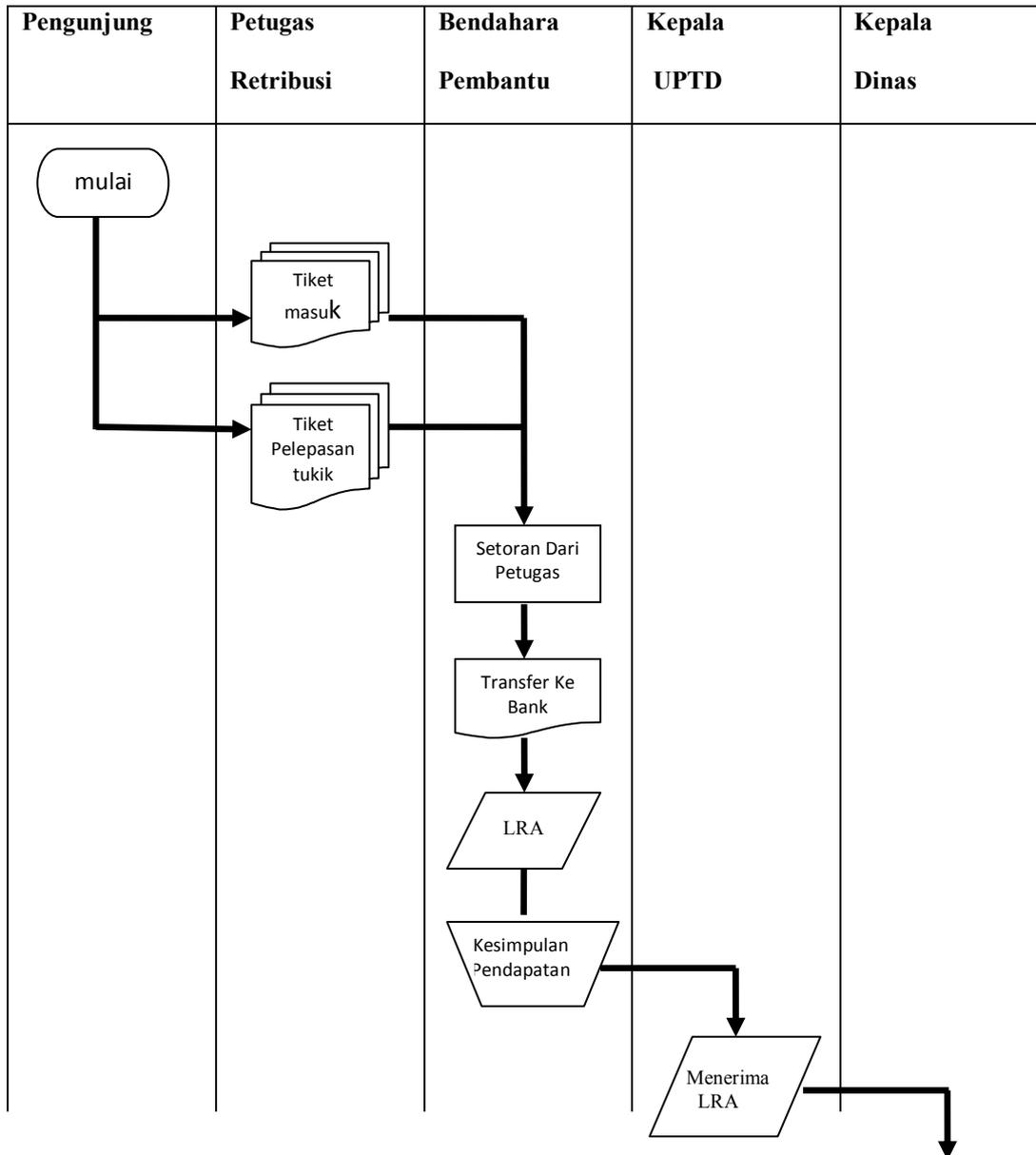
- a. Nilai etika
 - b. Struktur Organisasi
 - c. Metode Pembagian Tugas
 - d. Pengaruh Lingkungan dari Luar
2. Kegiatan Pengendalian
- a. Sistem dan Prosedur Akuntansi, Pelaksanaan dan prosedur penerimaan retribusi tiket masuk dan pelepasan tukik yang dilakukan di UPTD konservasi dan pengawasan bahwa SOP mulai dari penjualan tiket masuk dan pelepasan tukik digunakan sistem manual yang dipungut oleh petugas retribusi. SOP yang diterapkan di UPTd, dapat dijelaskan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD) yang merupakan alat pembuatan model yang memungkinkan professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai jaringan. Proses fungsional dihubungkan satu sama lain dengan alur data manual. Sehingga SOP dalam bentuk DFD lebih mudah dipahami. Untuk itu peneliti membuat DFD pada gambar dibawah:

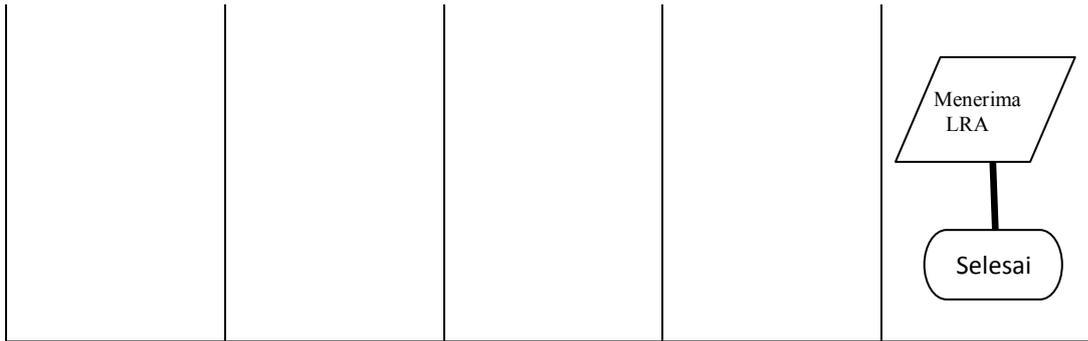


Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur DFD dapat dijelaskan mulai dari masyarakat sampai dengan pelaporan pendapatan dikirim ke Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat umum berkunjung membeli karcis masuk kepada petugas retribusi dan mengisi buku tamu dilayani oleh petugas dengan baik dan ramah. Petugas retribusi memberikan karcis (karcis masuk atau pelepasan tukik) dan menerima pembayaran langsung dari pengunjung.

SIA yang dihasilkan oleh UPTD harus menghasilkan bentuk alur penerimaan retribusi tiket masuk dan pelepasan tukik dalam bentuk *flowchart*. Untuk itu peneliti memberikan bentuk alur (*flowchart*) sistem penerimaan retribusi di UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman pada gambar dibawah ini:





b. Otorisasi

Sistem otorisasi diUPTD ini mulai dari adanya kunjungan masyarakat di otorisasikan atau dikendalikan oleh bagian penjualan tiket dan pelepasan tukik, serta dibantu oleh bendahara pembantu untuk penerimaan kas, dan kemudian di koordinasikan oleh tim edukasi sampai dengan selesainya pelepasan tukik, serta dilaporkan ke PAD.

c. Formulir (Tiket atau Karcis), Dokumen, dan Catatan Akuntansi

Tiket atau karcis masuk yang ada diUPTD dalam seminggu ditargetkan 700 lembar karcis yang tersedia untuk dijual, untuk tiket masuk berwarna merah muda (*pink*) yang terdiri dari 100 lembar per-hari, dan untuk pelepasan tukik berwarna hijau terdiri dari 100 lembar per-hari yang akan di jual kepada masyarakat yang berkunjung. Jika pengunjung kurang dari 100 perhari maka tiket akan dijual kembali pada hari esoknya dan jika pengunjung lebih dari dari seratus per-hari maka diambil tiket yang dicadangkan.

d. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas dalam proses pelaksanaan penerimaan pendapatan sudah dilaksanakan dengan baik. Dimana semua fungsi terkait tidak ada yang merangkap dua fungsi sekaligus.

3. Pemahaman Resiko

- a. Resiko strategis
- b. Resiko *Financial*.
- c. Resiko informasi

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi dari transaksi awal (penjualan tiket masuk dan pelepasan tukik) harus jelas, dan di *input* ke sistem komputeragardata yang masuk langsung bisa di baca dan dipahami dan menjadi informasi yang sangat baik untuk dilaporkan dalam pengambilan keputusan.

5. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan dapat diambil tindakan dengan segera.

Pengawasan Berdasarkan Lingkupnya

1. Pengawasan Umum

Pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh didalam perusahaan. Seperti pemberian kode tempat penetasan telur, *hatchery*, ruang karantina, pos jaga, kantor UPTD Konservasi dan Pengawasan, ruang informasi, penginapan untuk karyawan, Mushollah, WC dan semua dokumen yang diberi kode dan diletakkan ditempat yang tersimpan dengan baik.

2. Pengawasan Aplikasi

Perancangan aplikasi sudah dirancang sebaik mungkin dan sudah disesuaikan dengan objek yang diawasi. Seperti pengawasan pada:

- a. Pengawasan *input*
- b. Pengawasan Penyimpanan
- c. Pengawasan Keluaran
- d. Pengawasan komunikasi

Target Pendapatan yang ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Data target pendapatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2018 sebagai berikut:

Daftar Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Bulan : Desember 2018

No	Nama BBI	Target Tahun	Akhir s/d Akhir Desember 2018 = 100%	Realisasi			% bulan Desember	% Tahun 2018
				Bulan Nov	Bulan Des	s/d Bulan ini		
I	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah							
	1. Laboratorium di UPTD Pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan	18.000.000	18.000.000	30.965.000	23.665.000	54.630.000	303.50	303.50
	2. UPTD pelabuhan perikanan wilayah III	30.000.000	30.000.000	18.397.500	2.815.500	21.213.000	70.71	70.71
	3. UPTD BBI sicincin	3.000.000	3.000.000	13.200.000		13.200.000	440.00	440.00
	a) sewa mess,	1.300.000	1.300.000	4.500.000		4.500.000		364.15
	b) dan aula			3.222.188	2.879.050	6.101.238		0.00
	4. Sewa rumah							
	Jumlah I	52.300.000	52.300.000	70.284.688	29.359.550	99.644.238	190.52	190.52
II	Pelayanan Jasa Kepelabuhan							
	1. PPI Kambang Pessel	200.000.000	200.000.000	198.095.000	22.050.000	220.145.000	110.07	110.07
	2. PPI Air bangis dan sasak Pasbar dan tiku	350.000.000	350.000.000	504.215.000	79.345.000	583.560.000	166.73	166.73
	a) PPI Airbangis dansasak pasbar		20.000.000	66.290.000	10.920.000	77.210.000		
	b) Pelabuhan tiku agam		74.000.000	437.925.000	68.425.000	506.350.000		
	3. Pelabuhan perikanan wilayah I	20.000.000		26.776.000	3.618.000	30.394.000	151.97	151.97
	4. Konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	74.000.000		84.129.000	9.671.000	93.800.000	126.76	126.76
	5. Pelabuhan wilayah III/ Sikakap			37.754.000	14.395.000	52.149.000		
	Jumlah II	644.000.000	644.000.000	850.969.000	129.079.000	980.048.000	152.18	152.18
III	Penjualan Produksi Usaha Daerah							
	1. BBI Beringin Rao	4.840.000	4.840.000	5.650.000		5.650.000		
	2. BBI Padang Tinggi	7.134.000	7.134.000	14.519.000		14.519.000		
	3. UPTD Balai Budidaya Air laut dan Payau	250.000.000	250.000.000	255.400.000		255.400.000	102.16	102.16
	4. UPTD Pelabuhan perikanan	150.000.000	150.000.000	71.440.000	33.190.000	104.630.000	69.75	69.75

	wilayah III							
	Jumlah III	411.974.000	411.974.000	347.009.500	33.190.000	380.199.500	92.29	92.29

Sumber: UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa target untuk pendapatan yang berasal dari UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman (karcis masuk dan tiket pelepasan tukik), sebesar Rp.74.000.000 untuk tahun 2018.

Laporan Realisasi Pendapatan

Berikut pendapatan yang diterima dari Retribusi tiket masuk dan tiket pelepasan tukik selama bulan Mei sampai dengan bulan Desember sebagai berikut

Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Dari Penjualan Tiket Masuk dan Pelepasan Tukik

Bulan	Sumber		Pendapatan		Nilai (Rp)	Total
	Karcis	Rp	P. Tukik	Rp		
Mei	1.743 lbr	3.486.000	113 lbr	565.000	4.051.000	4.051.000
Juni	12.286 lbr	24.572.000	190 lbr	950.000	25.522.000	29.573.000
Juli	7.297 lbr	14.594.000	571 lbr	2.885.000	17.450.000	47.023.000
Agustus	2.915 lbr	5.830.000	351 lbr	1.755.000	7.589.000	54.612.000
September	2.096 lbr	4.192.000	209 lbr	1.045.000	5.237.000	59.849.000
Oktober	1.804 lbr	3.608.000	184 lbr	920.000	4.528.000	64.377.000
November	2.295 lbr	4.590.000	184 lbr	920.000	5.510.000	69.887.000
Desember	3.141 lbr	6.282.000			6.282.000	76.169.000
Jumlah Pendapatan					31 Desember	76.169.000

Sumber: UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan KKPD Pariaman

E. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian langsung di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman, kemudian penulis menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoleh maka dapat diambil kesimpulan bahwa disetiap UPTD Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal sangat besar fungsinya terhadap suatu kemajuan dalam meningkatkan pendapatan. Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan SOP atau bagan alir (sistem informasi akuntansi) mulai dari penerimaan retribusi tiket masuk dan pelepasan tukik sampai dilaporkan ke PAD sudah baik tetapi sedikit perlu ada penyempurnaan untuk bagian *flowcart* atau bagan alir dari

yang telah ditetapkan oleh UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman.

2. Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan di UPTD Konservasi dan Pengawasan sudah sangat baik dengan dibuktikannya pada pembagian tugas dan wewenang yang telah ditetapkan masing-masing. Kepala UPTD memberikan langsung otorisasi (pelimpahan wewenang) kepada petugas retribusi untuk memungut pendapatan yang berasal dari penjualan tiket masuk dan pelepasan tukik.
3. Laporan tentang pendapatan yang diterima oleh UPTD Konservasi dan Pengawasan dari penjualan tiket masuk dan pelepasan tukik untuk bulan Mei sampai Desember 2018 sudah mencapai target. Target yang ditetapkan sebesar Rp.74.000.000 dan pendapatan untuk tahun 2018 sebesar Rp.76.169.000 per tahun.

Saran

Penulis memberikan saran berdasarkan kelemahan dalam pembahasan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan masukan dan gagasan baru bagi UPTD Konservasi dan Pengawasan, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal. Berikut ini adalah saran yang penulis berikan bagi UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman :

1. Sebaiknya perlu penyempurnaan terhadap bagan alir atau *Flowchart* khusus terkait sistem penerimaan tiket masuk, pelepasan tukik dan pencatatan tiket sehingga diperoleh standar pengendalian yang memadai untuk UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman.
2. Adanya Pengendalian Internal yang lebih ketat untuk pengawasan umum terhadap karyawan yang kurang giat dan kurang intensif dalam menjalankan pekerjaan dalam jam kerja guna mencapai aktivitas yang baik dalam perkantoran.
3. Perlu evaluasi terhadap Pengawasan Umum, dan perlu ditingkatkan penjagaan terhadap pengunjung agar tidak ada pengunjung yang tidak dikenakan karcis. Karena adanya pengakuan dari sejumlah pengunjung bahwa mereka ada yang tidak dikenakan karcis. Dari adanya pengakuan pengunjung, disarankan agar pihak UPTD lebih tegas terhadap pihak retribusi. Petugas retribusi harus selalu siap sedia di posko depan maupun posko belakang.

Keterbatasan Penelitian

Sistem Informasi Akuntansi yang ada di UPTD Konservasi dan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan KKPD Pariaman, maka peneliti hanya mengambil data tahun 2018, peneliti mendapatkan data yang mengkaji tentang Sistem Informasi Akuntansi (SOP) yang ada di UPTD Konservasi dan Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Laporan Realisasi Anggaran (apakah pendapatan yang diperoleh sudah mencapai target yang ditetapkan) pada tahun 2018 disebabkan karena keterbatasan pada saat menganalisis data yang ada.

F. DAFTAR PUSTAKA

Andi.(2015). **“Sistem Informasi Akuntansi”**. Yogyakarta: Andi.

Ardana, Cenik & Hendro, L. (2016).**“Sistem Informasi Akuntansi”**. Edisi Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- B. Ilyas, Wirawan & Richard, Burton. (2011). **“Hukum Pajak “**. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Basuki.(2007). **“Pengelolaan Keuangan Daerah”**.Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Halim, Abdul. (2004). **“Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”**. Jakarta: Salemba Empat.
- Jarnuji.(2016). **“Sistem Informasi *E-Document* Pada Kantor Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tanggerang”**.Skripsi Program Studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer.
- Kesek, Feisly. (2013.) **“Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah”**. Jurnal Studi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo.(2002). **“Akuntansi Sektor Publi”**.Yogyakarta: Andi.
- Mosal. (2013). **“Analisis Efektivitas , Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado “** Jurnal Kota Manado.
- Mumaningtyas,Kristi Veronica Wahyu. (2007). **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah”**.Skripsi Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Republik Indonesia.(2016). **“Undang-Undang Republik Indonesia”**.Bandung: Fokusindo Mandiri.Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____ . (2008). **“ Amandemen Undang-Undang Republik Indonesia”**. Jakarta: Sinar Grafika. Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____ . (2009). **“ Undang-Undang Republik Indonesia”**. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
- Supramono & Theresia, Woro Damayanti. (2010). **“ Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan”**. Yogyakarta: Andi.
- Siahaan, Marihot P. (2005) **“Pajak Daerah dan Retribusi daerah”**.Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Suciati, Handayani & Hidayat, (2013). **“Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)”**. Jurnal Penelitian Kabupaten Sidoarjo.
- Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unifersitas Muhammadiyah Sumatera Barat. (2017). Padang: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. (2014). “**Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PADKabupaten Blora Tahun 2009-2013**”.Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

http://Wing Wahyu Winaro, Drs. 2006: ”**Sistem Informasi Manajemen**”, UPP STIM YKPN Yogyakarta, 10 Januari 2019. 19,20. Wib